

Analisis Kompensasi dan Kemiskinan

Y Sri Susillo



KEBIJAKAN pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM pasti menjadi pro dan kontra di berbagai kalangan. Demikian pula kebijakan dua harga untuk BBM bersubsidi yang akan diterapkan mendatang. Bagaimanakah dampak pengurangan subsidi BBM terhadap kemiskinan? Apakah program kompensasi mampu menekan angka kemiskinan?

Pengurangan subsidi BBM yang berarti kenaikan harga BBM akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa (inflasi), yang pada gilirannya akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat menurun, *ceteris paribus*. Penurunan tersebut jika terjadi pada masyarakat yang berada di sekitar atau pada garis kemiskinan, maka akan menyebabkan mereka jatuh dalam kemiskinan (Sri Handoko dan Sri Susilo, 2006).

Hasil simulasi Rakhmanto (2008), kenaikan harga BBM rata-rata sebesar 29% pada tahun 2008 menyebabkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan masing-masing sebesar 16,92% pertahun dan 8,55% pertahun. Kemudian Saparini (2008) menyatakan bahwa kenaikan harga BBM pada tahun 2005 telah menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin, dari 31,1 juta jiwa pada tahun 2005 menjadi 39,3 juta jiwa pada tahun 2006.

Kapan dan berapa besar kenaikan harga BBM bersubsidi tahun 2013 ini, memang secara resmi belum diumumkan. Di sisi lain, pemerintah ternyata telah menyiapkan instrumen untuk menekan

* Bersambung hal 10 kol 5

Kompensasi

dampak negatif dari kebijakan tersebut, khususnya meledaknya angka kemiskinan (KR, 24/4). Dengan kata lain, telah disiapkan program kompensasi untuk menekan kemungkinan meledaknya angka kemiskinan. Pertama, pemerintah akan memperbanyak jumlah masyarakat atau rumah tangga yang memperoleh beras bagi masyarakat miskin (Raskin).

Kedua, memperluas cakupan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan memperluas cakupan indeks unit biaya pendidikan. Ketiga, menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan kepada masyarakat atau rumah tangga miskin namun masih mempunyai anak yang masih sekolah. Dalam PKH juga mencakup pelayanan kesehatan. Pemberian kompensasi yang termasuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS) ini akan diberikan selama 16 bulan.

Apakah program kompensasi tersebut mampu menekan angka kemiskinan? Jawabnya sangat tergantung dari efektivitas pelaksanaan program tersebut. Jika dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif serta optimal, maka mampu menekan angka

Sambungan hal 1

kemiskinan dan sebaliknya.

Terlepas efektif serta optimal atau tidak program kompensasi tersebut, pengurangan subsidi BBM yang identik kenaikan harga BBM harus diikuti dengan program kompensasi. Dalam pemberian kompensasi, pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman masa lalu. Diharapkan tidak terjadi salah sasaran (*mistargeting*), baik kasus adanya rumah tangga tidak miskin yang menerima kompensasi (leakage) maupun rumah tangga miskin yang belum/tidak menerima kompensasi (*under-coverage*).

Pelaksanaan program kompensasi harus dipersiapkan dengan lebih baik, termasuk perbaikan (*updating*) basis data rumah tangga miskin. Bentuk kompensasi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau kompensasi dalam bentuk uang tunai adalah tidak tepat. Dengan demikian di masa mendatang diharapkan program kompensasi dapat berjalan lebih optimal dan efektif serta mampu menekan melonjaknya angka kemiskinan.

(Dosen FE UAJY, Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta, dan Pengurus Pusat ISEI-e)